

SIARAN PERS

No : SJ/B.VIII/3/HM.00/001/2014



KEMENTERIAN AGAMA

Jln. Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat

www.kemenag.go.id

Kemenag Sambut Baik Penyelidikan KPK Atas Dana Haji

Jakarta (Senin, 10/02/2014, 11:30) --- Sehubungan dengan Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penyelenggaraan Ibadah haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013 bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Juru Bicara KPK, Sdr. Johan Budi telah mengklarifikasi melalui acara “Apa Kabar Indonesia Malam” di sebuah stasion televisi swasta bahwa:
 - a. Status dari Permintaan Keterangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji telah ditingkatkan menjadi Penyelidikan KPK
 - b. Penyelidikan tersebut dilakukan berdasarkan laporan berbagai sumber dan kunjungan pengawas KPK ke Arab Saudi terhadap dugaan penyimpangan penyelenggaraan ibadah haji.
 - c. Penyelidikan difokuskan pada proses dan prosedur pengadaan pelayanan di Arab Saudi.
 - d. Tidak ada hubungan langsung antara 49 butir rekomendasi/action plan KPK yang pernah disampaikan pada tahun 2009/2010 yang lalu.
 - e. Sampai saat ini, proses penyelidikan terus berlanjut dan penyelidikan KPK tidak selalu berujung pada status Penyelidikan KPK.
2. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), Kemenag menyambut baik upaya tersebut dalam rangka perbaikan Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan kooperatif terhadap proses penyelidikan KPK tersebut. Ditjen PHU sudah menyampaikan seluruh salinan regulasi, data-data dan dokumen-dokumen terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diperlukan KPK.
3. Sejak awal tahun 2012, sebagian besar pejabat di lingkungan Ditjen PHU telah diminta keterangan, baik di kantor KPK, di kantor Ditjen PHU dan di kantor Wisma Haji Indonesia di Arab Saudi.
4. Permintaan keterangan oleh pihak KPK pada umumnya menyangkut prosedur penyediaan pelayanan di Arab Saudi dan pengisian kuota pendaftaran jamaah dan petugas. Tidak ada permintaan keterangan secara spesifik mengenai kewajaran laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji.
5. Pada tahun 2010, Ditjen PHU telah menerima 49 rekomendasi KPK mengenai regulasi perbaikan penyelenggaraan Ibadah Haji dan telah menyampaikan dokumen penyelesaian melalui surat Ditjen PHU kepada Wakil Ketua KPK/Direktur Litbang KPK pada tanggal 8 September, 17 Septeber, 13 Desember 2012, 3 Januari, 27 Februari, 22 Mei 2013, namun hingga saat ini belum ada tanggapan dan *follow-up* dari pihak KPK.

6. Ditjen PHU dan PPATK telah melakukan pertemuan pada tanggal 9 Januari 2013 membahas mengenai perbedaan pendapat dengan PPATK terhadap outstanding dana haji dan penyimpangan aliran dana sebesar Rp230 milyar sejak 2004 hingga 2012. Berdasarkan hasil audit BPK telah ditetapkan bahwa outstanding dana haji per Desember 2012 adalah Rp53 triliun. PPATK menghitung dana Rp80 triliun dan bunga Rp2,3 triliun setiap tahun berdasarkan dana masuk (*cash-in*) ke rekening Kementerian Agama sejak tahun 2004-2012. Kedua institusi tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut karena semata-mata disebabkan adanya perbedaan pendekatan perhitungan semata. Mengenai penyimpangan aliran dana keuangan mencurigakan kepada pegawai Ditjen PHU di masa lampau telah diklarifikasi bahwa hal tersebut adalah praktik yang terjadi di masa lampau di mana dana kegiatan APBN dan BPIH ditransfer melalui rekening pribadi bendahara. Praktik tersebut meskipun belum tergolong korupsi atau penyalahgunaan, namun tidak dibenarkan. Pada saat ini, hal tersebut telah dikoreksi yang mana tidak ada lagi rekening pribadi sebagai rekening penampungan dana kegiatan.
7. Dirjen PHU Anggito Abimanyu mengatakan bahwa “Kami akan terus melakukan pembenahan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan dana haji melalui perbaikan regulasi, integrasi sistem pendaftaran, dokumen dan keuangan, rasionalisasi biaya BPIH dan optimalisasi nilai manfaat”. Di samping itu Dirjen PHU berkeyakinan bahwa “Penyelidikan oleh KPK merupakan momentum perbaikan seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji ke depan”.

Demikian keterangan pers untuk dapat dijadikan rujukan bersama.

Jakarta, 9 Februari 2014
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kementerian Agama RI

ttd

Dr. Anggito Abimanyu

Informasi lebih lanjut:

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Anggito Abimanyu)

Telepon : +62 81 1965 855

Fax : +62 21 3859117

Email : humas@kemenag.go.id